

## PERAN PEMERINTAHAN DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI KELURAHAN CEREME TABA KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR II KOTA LUBUKLINGGAU

Novia Hartini<sup>1</sup>, M. Fadhillah Harnawansyah<sup>2</sup>, Wendi Aji Saputra<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

Email: [noviahartini704@gmail.com](mailto:noviahartini704@gmail.com)

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine the role of government in empowering farmer groups in Lubuklinggau Timur II District, Lubuklinggau City. The method used in this study is a qualitative method using a descriptive approach through observation, interviews and documentation. The type of data source used is primary data obtained from the results of observation and interviews, as well as secondary data obtained from documentation. The results of this study can be concluded that the local government through the Agriculture Service carries out farmer group empowerment by providing seed assistance, and also equipment assistance for farmers in Cereme Taba Village. The program is running well, only the role of government in empowering farmer groups has not been maximized. The role of government as the main agency in the country has a very important role for ongoing development process, both human resource development and other infrastructure where the government is required to be able to become a state organizer in realizing development and progress and becoming a driver of achieving community welfare.*

**Keywords:** Role; Government; Society

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil observasi, dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian melaksanakan pemberdayaan kelompok tani dengan memberikan bantuan bibit, dan juga bantuan alat bagi petani yang ada di Kelurahan Cereme Taba Program tersebut berjalan sesuai dengan baik hanya saja peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani belum maksimal. Peran pemerintah sebagai pelaksanaan utama dalam negara mempunyai peran yang sangat penting demi berlangsungnya proses pembangunan baik pembangunan sumber daya manusia maupun infrastruktur lainnya. Dimana pemerintah dituntut untuk mampu menjadi penyelenggara negara dalam mewujudkan perkembangan dan kemajuan serta menjadi pendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Peran; Pemerintah; Masyarakat

## **PENDAHULUAN**

Sebagai pelaksana utama negara, pemerintah berperan penting dalam proses pembangunan yang sedang berjalan, termasuk perbaikan infrastruktur dan sumber daya manusia. Karena itu pemerintah perlu menjadi penyelenggara negara guna mencapai pembangunan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat. Maka untuk melihat derajat kemajuan dan kemajuan masyarakat, dapat dilihat dari derajat administrasi yang diberikan oleh otoritas publik kepada daerah itu sendiri.

Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan daya saing masyarakat tidak lepas dari peran pemerintah. Melihat apa yang terjadi saat ini, masyarakat di zaman yang sudah maju ini berkembang begitu pesat dan kemajuan inovasi dan komunikasi berarti semua individu harus mempunyai pilihan untuk mempersiapkan diri untuk terus mengembangkan kapasitasnya yang sebenarnya, yang kemudian, pada saat itu, tidak hanya datang dari lingkungan sekitar tetapi juga menjadi keperluan pokok mereka. agar penyelenggara negara, baik negara fokus maupun teritorial, tetap berperan serta dalam mengelola dan membantu daerah dalam melaksanakan kewajiban dan pekerjaan pemerintahan, sehingga dapat mengambil bagian penting dalam melaksanakan bantuan pemerintah daerah.

Agar seluruh lapisan masyarakat mampu menerima dan memaknai segala bentuk keputusan pemerintah, dan agar pemerintah lebih mampu menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun daerah dengan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka yang utama adalah: standar bagi pemerintah adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kelompok masyarakat merupakan sasaran utama dalam berhasil atau tidaknya penguasa publik dalam menjalankan kewajibannya. Meningkatnya atau menurunnya taraf hidup masyarakat menunjukkan berhasil atau tidaknya pemerintah.

Otoritas publik juga harus mempunyai pilihan untuk mengambil peran penting dengan mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat untuk menjangkau dan mengambil bagian dalam proses perbaikan daerah sehingga dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat akan lebih mudah bagi otoritas publik untuk mengambil tindakan. yang ada di arena publik.

Hal itu telah diarahkan dalam Pedoman Agrobisnis Agribisnis Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Aturan Peningkatan Usaha Penyuluhan Pertanian Otonom pada Bagian III tentang Pembinaan dan Pemajuan Organisasi Penyuluhan Agraria yang Merdeka yang sejauh ini Kemajuan untuk memperkuat fondasi daerah, otoritas publik harus mempunyai pilihan untuk melaksanakan dan melaksanakan kegiatan melalui apresiasi, sosialisasi, bantuan, dukungan kelembagaan, dan persiapan. Agar petani dapat memaksimalkan program pemerintah untuk

pengembangan masyarakat dan maju melalui pemberdayaan masyarakat, maka pemerintah harus melakukan pengembangan kelembagaan kelompok tani secara berkelanjutan dan berorientasi pada pola pengembangan masyarakat. Pola-pola tersebut selanjutnya harus diarahkan pada pola pikir petani mengenai penerapan sistem pertanian baik pada kelompok pertanian mikro maupun makro.

Diperkuat dengan pedoman yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaulat dan mandiri khususnya di bidang pertanian sehingga petani dapat meningkatkan tingkat kesejahteraannya. kualitas, dan kualitas hidup. Pentingnya peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Perlindungan dan pemberdayaan petani ada beberapa bagian, antara lain perencanaan, perlindungan petani, dan pemberdayaan petani, hingga bagian partisipasi petani dalam pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan kelompok peternak merupakan salah satu cara untuk memperluas bantuan pemerintah dan otonomi dalam membangun jaringan melalui pelatihan, pendidikan dan akses terhadap aset. Hal ini mencakup upaya membina pertemuan untuk mengenali kebutuhan mereka dan mendorong pengaturan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Praktik pertanian yang lebih baik, pengelolaan keuangan, dan akses terhadap pasar hanyalah beberapa dari banyak topik yang dapat ditangani oleh kelompok pemberdayaan petani. Tujuan dari pemberdayaan kelompok tani adalah untuk membantu masyarakat tani meningkatkan pendapatan mereka, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Pemberdayaan kelompok tani dapat diimplementasikan oleh pemerintah, lembaga swasta, atau organisasi nirlaba, dan dapat menjadi instrumen yang sangat berharga untuk membantu pengembangan jaringan dalam mengatasi kesulitan dan mencapai kapasitas maksimalnya. Pemberdayaan adalah proses meningkatkan kapasitas individu, kelompok, atau komunitas untuk mengendalikan dan membuat keputusan tentang kehidupan mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk memberikan mereka kekuatan, pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Pemberdayaan sering melibatkan peningkatan akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesempatan, serta penghapusan hambatan struktural yang menghalangi partisipasi dan kemajuan mereka.

Dimungkinkan untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang pemberdayaan desa baik di pusat maupun daerah. Kenyataannya pemerintah kurang aktif turun langsung ke masyarakat untuk memberikan berbagai macam pemahaman, dan pemerintah masih kurang aktif mendampingi masyarakat Petani memberikan bimbingan langsung dalam

mengelola pertanian dan pelatihan kepada masyarakat. Selain itu, peran pemerintah sebagai dinamisme menjadi sesuatu yang tidak sesuai harapan yang terjadi di Kelurahan Cereme Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, dan Kota Lubuklinggau. Absennya peran pemerintah untuk turun ke lapangan melihat keadaan yang terjadi di lapangan juga menjadi poin sentral yang menjadi permasalahan bagi daerah karena pemerintah tidak bisa memberikan gambaran apa-apa tentang hal tersebut. hal-hal mendasar yang menjadi kebutuhan pokok daerah, yang kemudian menjadikan daerah kurang dinamis dalam menyalurkan dan memberi batasan dalam menyelesaikan pergantian peristiwa. untuk mencapai kesuksesan di arena publik.

Program penguatan kelompok masyarakat yang harus dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu tindakan administrasi yang harus berjalan terus-menerus dan diarahkan pada pergantian peristiwa dan bantuan pemerintah daerah setempat, yang kemudian dapat dikatakan bersifat penguatan sejauh perbaikan yang terjadi di daerah setempat dan terjadi secara terus-menerus dan ekonomis untuk menciptakan cara hidup yang lebih baik bagi daerah setempat. , untuk melihat apa yang terjadi dan kondisi yang terjadi di ranah publik, sama halnya dengan tugas pemerintah dalam gagasan penguatan, maka penguatan wilayah lokal dipecah menjadi dua bagian besar, yaitu jaringan yang diciptakan oleh masyarakat miskin sebagai wadah berkumpul atau tujuan yang harus diaktifkan dan jaringan yang dibuat dengan kontras kelas atau dengan nama berbeda. Pemerintah, kelas elit, berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat. Tugas otoritas publik adalah hal yang lumrah, baik negara bagian fokal maupun lokal seharusnya mempunyai pilihan untuk memberikan tugas yang signifikan dan mempunyai pilihan untuk memberikan komitmen positif kepada masyarakat dalam hal penguatan wilayah lokal dengan harapan bahwa otoritas publik akan melakukan hal yang sama. sebenarnya ingin menjadi salah satu unsur dalam memberikan pelayanan kepada daerah, dengan fokus pada perbaikan yang berorientasi pada kemajuan masyarakat terkait dengan bidang pertanian. Oleh karena itu, masyarakat mutlak memerlukan peran pemerintah, baik sebagai regulator yang memberikan aturan dasar bagi pengembangan petani (regulator) kepada masyarakat, maupun sebagai dinamisator yang menjadi motor penggerak masyarakat dalam proses pemberdayaan petani. masyarakat (fasilitator) dalam rangka mencapai tujuan pengembangan kesejahteraan masyarakat (Labolo, 2010:36).

Peran pemerintah sebagai regulator adalah untuk mengatur dan mengawasi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Ini melibatkan pembuatan dan penerapan peraturan, standarukum yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan memastikan bahwa kepentingan publik dipertimbangkan dalam semua keputusan yang dibuat. Pemerintah juga dapat berperan

sebagai regulator dalam mengawasi dan mengontrol kegiatan Ini melibatkan meninjau kegiatan mereka untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah juga dapat berperan sebagai regulator dalam mengawasi dan mengontrol kegiatan individu, termasuk pengawasan aktivitas keuangan mereka dan memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara keseluruhan, peran pemerintah sebagai regulator adalah untuk memastikan bahwa kepentingan publik dipertimbangkan dalam semua keputusan yang dibuat dan bahwa masyarakat dilindungi dari bahaya potensial.

Pengamatan penulis menunjukkan bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan tidak sejalan dengan apa yang seharusnya terjadi terkait keterlibatan pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di Kelurahan Cereme Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, menimbulkan sejumlah permasalahan. Peran pemerintah sebagai regulator masih terbatas, hal ini terlihat dari dukungannya terhadap kesejahteraan petani (regulator) namun ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan edukasi kepada petani mengenai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah membuat masyarakat petani tidak mampu untuk mematuhi.

Selain itu, fungsi pemerintah sebagai “dinamisator” di Kelurahan Cereme Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, dan Kota Lubuklinggau belum sesuai harapan. Faktanya adalah pemerintah tidak berbuat banyak untuk menjangkau komunitas petani untuk membantu mereka memahami masalah mereka dan menemukan solusi. Selain itu, pemerintah masih belum aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat petani dalam bentuk apapun, seperti memberikan pelatihan atau arahan langsung kepada masyarakat tentang cara mengelola pertanian. Kurangnya keterlibatan pemerintah untuk terjun langsung ke lapangan melihat kondisi yang terjadi menjadi faktor besar lainnya yang menjadi permasalahan bagi masyarakat karena pemerintah tidak mampu menjalankan fungsi tersebut. di lapangan juga menjadi faktor utama yang menjadi permasalahan bagi masyarakat karena pemerintah tidak mampu menjalankan fungsi tersebut sehingga masyarakat memerlukan kunjungan lapangan yang lebih terjadwal namun sebaliknya yang terjadi adalah pemerintah sangat jarang melakukan kunjungan lapangan. kepada masyarakat demi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat petani itu sendiri.

Pemerintah selaku penyedia sarana dan prasana bagi masyarakat fasilitator sudah mampu menyediakan kebutuhan masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani di Kelurahan Cereme Taba sebagaimana fungsi pemerintah sebagai media untuk memberikan fasilitas yang memadai bagi petani,

namun dilihat dari fakta yang terjadi dilapangan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat petani telah sampai masyarakat namun hal tersebut tidak diindahkan atau kurang dimanfaatkan oleh masyarakat petani karena masalah teknis penggunaan maupun pemanfaatan yang masyarakat itu sendiri kurang paham.

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah untuk memfasilitasi dan mendukung berbagai inisiatif dan program, term program sosial, pendidikan, dan ekonomi. Ini melibatkan bekerja sama dengan organisasi nirlaba, lembaga swasta, dan organisasi lain untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan solusi yang akan memenuhi kebutuhan tersebut. Pemerintah juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam mengkoordinasikan dan mengelola berbagai program dan inisiatif, termasuk program kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Ini melibatkan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, dan anggota masyarakat, untuk mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan solusi yang akan memenuhi kebutuhan.

Kenyataannya, dari akibat persepsi yang mendasari pencipta sebelum dilakukan pemeriksaan, terlihat bahwa otoritas publik sebagai dinamisor tidak mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh daerah setempat, seperti yang terjadi di Kota Cereme Taba, Lubuklinggau Timur. Wilayah II Kota Lubuklinggau, Otoritas Publik tidak bisa memberikan arahan yang eskalasi dan layak. kepada daerah setempat, karena arahan dan jalur ini sangat penting untuk penguatan jaringan budidaya, hal ini penting untuk mengimbangi unsur badan khusus yang dapat memberikan arahan kepada daerah setempat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Peran**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan peranan sebagai “sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa”. Inilah definisi peran. Sebaliknya, peran, sebagaimana didefinisikan oleh istilah tersebut, adalah serangkaian perilaku yang diharapkan untuk ditunjukkan oleh anggota masyarakat.

Menurut Lepa (2019:3) Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu dimana kegiatan tersebut dapat memberikan sesuatu yang diharapkan masyarakat sesuai dengan status yang dimiliki individu tersebut sehingga pekerjaan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan mempunyai dampak yang besar sepanjang kehidupan sehari-hari. Kurnia (2019:42) mengartikan peran sebagai contoh nyata tingkah laku seseorang yang mempunyai daya mengubah kehidupan dan menjadi teladan bagi masyarakat. Menurut sosiologi, peran adalah suatu sikap atau gerakan tertentu yang diambil masyarakat dalam rangka memenuhi kedudukannya, yang



meliputi pelaksanaan hak dan tanggung jawab tertentu sebagai pemegang suatu jabatan.

Ketika mereka terbiasa berinteraksi dengan orang lain, komunitas sosial yang ada dalam masyarakat, peran akan memperoleh makna. Peran mencakup norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Di sini peran dapat berarti aturan-aturan yang menjadi pedoman seseorang dalam masyarakat. Pengertian peran mencakup tiga hal. Seseorang berperan dalam masyarakat melalui perannya. Peran juga penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pendapat dari Bahtiar (2011:8) :

menjelaskan bahwa peran dinamis merupakan bagian dari suatu jabatan. Dengan asumsi bahwa seseorang menyelesaikan kebebasan dan komitmen sesuai situasinya, dapat dikatakan bahwa dia berperan dalam hal ini.

Soerjono Soekanto (2002:243) menyampaikan:

Secara spesifik, peran merupakan aspek dinamis dari jabatan (status); apabila seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan jabatannya, maka ia sedang menjalankan suatu peran. Dari uraian di atas, kita dapat melihat kesimpulan lebih lanjut mengenai pekerjaan-pekerjaan yang belum sepenuhnya ditetapkan, yang disinggung sebagai pekerjaan yang mengatur.

Menurut Merton (dalam Raho 2007 : 67):

mengatakan bahwa pola perilaku yang diharapkan masyarakat dari orang-orang dengan status tertentu itulah yang menentukan suatu peran. Berbagai pekerjaan dikenal sebagai kumpulan pekerjaan. Oleh karena itu, kelengkapan hubungan antarmanusia berdasarkan peran seseorang dalam masyarakat merupakan definisi lain dari peran.

## **Pemerintah**

Secara etimologis pemerintahan menurut Pamudji (2012:22) diartikan bermula dari kata pemerintahan, sedangkan arti kata pemerintahan berasal dari kata ketertiban. Namun menurut Kamus Besar KBBI Bahasa Indonesia, perintah adalah kata yang memerintahkan atau mengarahkan seseorang untuk melakukan suatu tugas. Pemerintah adalah kekuasaan yang mengawasi suatu negara. Selain itu, pengertian pemerintahan adalah suatu tindakan yang mengatur tingkah laku atau tindakan.

Sementara itu, pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menguraikan tentang kewenangan pemerintah, yaitu: Sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan pada pasal 7 bahwa peranan pemerintah pusat adalah memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah, dan bagian kedua pasal 7 menjelaskan bahwa presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kedua ketentuan ini berkaitan dengan peran pemerintah pusat. Maka pedoman hukum yang diberikan di atas menjadi alasan utama bagi penguasa publik dalam menyelenggarakan pemerintahan dan

sebagai orang mendasar yang bertanggung jawab memberikan peranan penting dalam penguatan daerah.

Menurut Pendapat Davey (2008:21):

Bahwa pemerintah menjalankan lima fungsi utama, yang pertama adalah sebagai penyedia layanan. Artinya pemerintah memberikan pelayanan yang fokus pada masyarakat dan lingkungan. Kedua, kemampuan administratif adalah kemampuan yang berkaitan dengan perincian dan pengesahan pedoman. Fungsi pemerintah yang ketiga dalam bidang pembangunan berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Keempat, peran yang dimainkan oleh perwakilan dalam mewakili masyarakat di luar yurisdiksi mereka, dan kelima, peran yang dimainkan pemerintah dalam mengoordinasikan penggunaan lahan, investasi, dan perencanaan.

Salah satu tanggung jawab utama yang harus dilakukan oleh pimpinan puncak, yang merupakan pemimpin organisasi, adalah peran pemerintah, yang merupakan kebutuhan mutlak dalam organisasi mana pun—swasta atau publik. Menurut Sutarto dalam Alam (2012:11), kurangnya koordinasi dan komunikasi dalam suatu organisasi akan menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Konflik antar pejabat atau aparatur yang ada dalam suatu lingkungan organisasi mengakibatkan terbentuknya kelompok-kelompok bidang kerja atau wewenang yang masing-masing hanya menganggap bidang pekerjaannya saja sebagai tugasnya.
- b. Karena setiap orang meyakini bahwa tanggung jawab kerja merupakan tanggung jawab individu dan bukan tanggung jawab kolektif, maka anggota organisasi atau unit kerja mendelegasikannya kepada orang lain.
- c. Dalam mencapai tujuan yang bersifat otoritatif, segala sesuatunya berada dalam kekacauan, dimana para pimpinan puncak enggan melakukan pekerjaannya, keadaan menjadi buruk, pekerjaan saling bertentangan sehingga banyak terjadi persilangan waktu dalam pekerjaan.

## **Pemberdayaan**

Menurut Suwatno (2011:182) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata “kekuasaan” yang berarti kemampuan untuk melakukan suatu tugas atau tindakan. Menjadi “kuat” dengan awalan ber- berarti kuat, cakap, dan mempunyai akal (cara, dsb) untuk mengatasi sesuatu. Memperoleh awalan dan akhiran pesan sehingga menjadi pemberdayaan, yang dapat diartikan sebagai usaha, proses, atau kemampuan untuk bertindak atau berbuat sesuatu.

Menurut pendapat (Suharto, 2014:57) :

Wajar saja jika penguatan atau penguatan berasal dari kata “kekuatan” dan itu mengandung arti kekuasaan atau penguatan. Jadi gagasan mendasar tentang penguatan berhubungan langsung dengan gagasan tentang kekuatan. Oleh karena itu, kekuasaan menjadi sebuah objek yang selalu dikaitkan dengan



kemampuan kita dalam menggunakan otoritas untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, meskipun mereka juga mempunyai keinginannya sendiri yang dikesampingkan di belakang keinginan kita.

Menurut pendapat (Hastuti dan Respati 2009) :

Terhadap program penguatan yang dilakukan oleh otoritas publik, kehadiran budaya man centric yang menjadi kekuatan budaya Indonesia menjadi salah satu unsur yang menghambat penguatan.

Menurut pendapat Ife dalam (Suharto 2014:58) :

Penguatan tersebut mengandung dua implikasi utama, yaitu kekuasaan khusus sebagai pemegang kendali dan kelompok bawah yang mendapat arahan dan melakukan segala sesuatu yang diminta oleh para ahli.

Menurut pendapat (Alfitri, 2011:21) :

Penguatan pada hakekatnya menempatkan kawasan lokal sebagai titik fokus pertimbangan dan selanjutnya menjadi penghibur fundamental yang dikembangkan. Paradigma pemberdayaan merupakan proses pembangunan yang mendorong inisiatif masyarakat yang berakar dari bawah dan merupakan pembangunan yang berpusat pada masyarakat.

### **Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani**

Menurut Siagian (2009:142), pemerintah memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, standar primernya terdiri dari beberapa peran pemerintah, yaitu: Ada yang berpendapat bahwa pemerintah mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah memainkan peran ganda. yang merupakan standar utama, yaitu:

- a. Otoritas publik sebagai penstabil, bahwa tugas otoritas publik sebagai penstabil adalah mewujudkan keseimbangan sosial yang berlandaskan pada terjaminnya keadaan sosial di mata masyarakat.
- b. Peran pemerintah sebagai inovator: Sebagai inovator, pemerintahlah yang mewujudkan gagasan-gagasan pembangunan yang kreatif dan baru. Inovasi-inovasi baru tersebut hadir dalam bentuk metode dan sistem serta cara berpikir baru demi kemajuan dan kemandirian masyarakat. untuk memastikan bahwa situasi dan keadaan yang diciptakan oleh inovasi pemerintah tepat seperti yang diharapkan dan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat tetap efektif.
- c. Otoritas publik sebagai modernisator, dalam hal ini kemampuan otoritas publik untuk membimbing dan mendorong masyarakat untuk berpikir maju dan hidup kekinian, dari kerangka di berbagai negara menunjukkan bahwa untuk berperan sebagai modernisator di wilayah lokal yang lebih luas maka siklus modernisasi sebaiknya dilakukan terlebih dahulu di wilayah lokal yang lebih luas. administrasi pemerintahan itu sendiri.
- d. Otoritas publik sebagai perintis, maksudnya dalam kehidupan bernegara seharusnya otoritas publik menjadi perintis bagi masyarakat, sehingga berubah

menjadi perintis. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat harus bisa bertaqwa kepada pemerintah.

- e. Pemerintah bertindak sebagai pelaksananya sendiri, artinya pemerintah diharapkan menjadi pelaksana yang dapat bertindak sebagai pelaksana sendiri dalam berbagai kegiatan. Namun, masyarakat petani berharap dengan memberikan kekuatan yang lebih besar kepada kelompok tani akan membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan produktivitas pertanian. Beberapa tugas pokok dalam mengumpulkan penguatan para peternak adalah:
  - i. Peningkatan Kapasitas  
Melalui pelatihan dan pendidikan petani dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam teknik budidaya, manajemen usaha tani, dan penggunaan teknologi pertanian terbaru.
  - ii. Akses Sumber Daya  
Kelompok tani dapat memfasilitasi akses petani ke sumber daya seperti bibit unggul, pupuk, alat pertanian, dan modal melalui program-program pemerintah
  - iii. Kunjungan Lapangan Kelompok tan imungkinkan petani untuk membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintahan, lembaga penelitian, penyuluh pertanian, dan pasar. Hal ini dapat meningkatkan peluang pemasaran dan penjualan hasil pertanian.

## **METODE PENELITIAN**

Teknik pemeriksaan yang akan digunakan dalam eksplorasi ini adalah strategi subjektif yang menjelaskan. Sesuai Sahya Anggagara (2015, p. 13) mengungkapkan bahwa teknik eksplorasi adalah suatu strategi logis dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada pada daerah ujian serta mengumpulkan informasi dan pendaftaran. sudut pandang akan menjawab permasalahan yang diteliti. Pemeriksaannya menggunakan teknik eksplorasi subjektif yang mencerahkan yaitu memahami sesuatu yang terjadi dengan fokus pemeriksaan dari atas ke bawah. Penelitian ini dipilih karena menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran regulator**

Peran regulator atau lembaga pengatur adalah sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan untuk mengawasi, mengontrol, dan mengatur aktivitas yang dilakukan oleh organisasi atau individu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan di bidang lingkungan, regulator memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan. Regulator juga sering kali bertugas untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat umum dari praktik bisnis yang merugikan. Ada pula yang berpendapat bahwa pemerintah mempunyai peranan

penting dalam proses pembangunan nasional. Jadi ada beberapa tugas otoritas publik. Tolok ukur mendasarnya adalah:

- a. Otoritas publik sebagai stabilisator, bahwa tugas otoritas publik sebagai stabilisator adalah mewujudkan keseimbangan sosial yang berarah pada sehatnya keadaan sosial di mata publik.
- b. Tugas otoritas publik sebagai trend setter, sebagai perintis otoritas publik adalah pelaksana dalam menghasilkan pemikiran-pemikiran yang imajinatif dan inovatif dalam bidang perbaikan, kemajuan-kemajuan baru yang diciptakan oleh otoritas publik sebagai strategi dan eksekusi dengan kerangka dan pemikiran baru. proses untuk kemajuan dan kebebasan masyarakat. Dengan tujuan agar keadaan dan kondisi tersebut diakibatkan oleh pembangunan. Kota Cereme Taba adalah salah satu kecamatan di Kawasan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Wilayah Sumatera Selatan, Indonesia. Latar belakang sejarah penataan sub kawasan ini erat kaitannya dengan kemajuan organisasi dan administrasi kewilayahan di Kota Lubuklinggau.

### **Kerjasama pihak terkait**

Berdasarkan hasil penelitian, aspek regulasi telah diterapkan melalui program Pkh Kota Lubuklinggau melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait khususnya kerjasama dengan dinas pertanian dimana mereka melakukan kerjasama setiap mengadakan kegiatan untuk kegiatan yang dilakukan di sub Cereme Taba.

Berdasarkan hasil penelitian diatas sesuai dengan Menurut teori Siagian (2009:142), pemerintah memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, tolok ukur utamanya adalah berbagai tanggung jawab pemerintah terhadap peraturan. Pemerintahan sebagai pengendali mengandung arti bahwa pemerintah sebagai pelaksana dan penggerak masyarakat hendaknya merencanakan arah penyesuaian pelaksanaan perbaikan umum sebagai suatu cara untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan latihan penguatan daerah.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat diklarifikasikan bahwa Kerjasama dengan Dinas Pertanian dengan Kelompok Tani Dimana mereka bekerjasama setiap mengadakan kegiatan, didukung data berupa dokumentasi photo di Kelurahan Cereme Taba. dari hasil Kerjasama ini dapat di harapkan untuk memajukan pertanian yang ada di kelurahan cereme taba.

### **Pemberian Informasi**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran regulator dengan cara Pemberian informasi kepada masyarakat Kelurahan Cereme Taba sangatlah penting Menurut teori Siagian (2009:142), pemerintah memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, tolok ukur utamanya adalah berbagai tanggung jawab pemerintah terhadap peraturan. Pemerintahan sebagai pengendali mengandung arti bahwa pemerintah sebagai pelaksana dan penggerak masyarakat hendaknya merencanakan arah penyesuaian pelaksanaan perbaikan umum sebagai

suatu cara untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan latihan penguatan daerah oleh petani secara menyeluruh. Pemberian informasi sesungguhnya sangat bermanfaat bagi kepentingan petani yang ada di Desa, apa lagi informasi yang disampaikan sangat membantu dalam perkembangan dan kemajuan para petani dalam meningkatkan hasil pertaniannya.

Berdasarkan hasil penelitian diatas sesuai dengan hipotesis (Mardikanto, 2009). Selain mampu mengarahkan petani, penyuluh pertanian juga harus merupakan tenaga ahli yang berkompeten, mampu memotivasi, mendidik, dan meningkatkan kesadaran petani agar dapat menggugah minat mereka untuk mempelajari cara mengatasi permasalahan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dapat diklarifikasikan bahwa Kerjasama dengan Dinas Pertanian dengan Kelompok Tani Dimana mereka bekerjasama setiap mengadakan kegiatan, didukung data berupa dokumentasi photo di Kelurahan Cereme Taba. dari hasil Kerjasama ini dapat di harapkan untuk memajukan pertanian yang ada di kelurahan cereme taba.

### **Peran Dinamisor**

Kekuasaan publik sebagai dinamisme merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kenyamanan kepada daerah untuk bergerak dan mengambil bagian dalam siklus perbaikan, dalam mengikuti dan memberdayakan unsur-unsur perubahan wilayah yang ada disekitarnya. Fungsi dinamis pemerintah adalah memberikan bimbingan dan arahan yang efektif dan komprehensif kepada masyarakat tanpa mempertimbangkan strata atau perbedaan sosial. Oleh karena besarnya kebutuhan masyarakat terhadap peran yang dilakukan pemerintah, maka pemerintah perlu memberikan bimbingan, arahan, dan masukan agar dinamika pemerintahan di masyarakat tetap terjaga. Hal ini dapat dilakukan melalui lembaga pemerintah tertentu dan penyuluh yang bekerja di masyarakat untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat. Fungsi dinamisme dalam suatu kelompok atau organisasi adalah sebagai penggerak dan pendorong perubahan yang positif.

Dinamisator bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua anggota kelompok terlibat aktif dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mereka juga mengidentifikasi masalah, menawarkan solusi, dan memotivasi anggota lain untuk berpartisipasi aktif dalam proses perubahan dan pengembangan. Selain itu, dinamisator juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan kreativitas.

Berdasarkan hasil observasi, Wawancara dan dokumentasi dapat diklafifikasikan bahwa Pemberian informasi yang telah di berikan oelh Dinas pertanian sudah di lakukan di Kelurahan cereme taba.

### **Kunjungan Lapangan**

Kunjungan lapangan merupakan suatu tindakan untuk mensurvei atau melihat keadaan suatu lahan atau suatu tempat untuk pertimbangan dan pengecekan. Salah satunya adalah survei terhadap perkumpulan peternak, khususnya kelompok

subwilayah Cereme Taba. Kunjungan lapangan adalah kegiatan di mana individu atau kelompok mengunjungi lokasi tertentu untuk tujuan pendidikan, penelitian, atau pengamatan langsung. Kunjungan ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik atau fenomena yang sedang dipelajari. Dalam konteks pertanian, kunjungan lapangan sering kali melibatkan petani atau kelompok tani yang mengunjungi lokasi tertentu untuk belajar tentang teknik pertanian, praktik terbaik, atau inovasi terbaru di bidang pertanian.

Berdasarkan hasil penelti dibawah sesuai dengan teori Konstruktivisme (Jean Piaget), menyatakan bahwa kunjungan lapangan adalah hal yang mencakup berbagai pendekatan yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses pembelajaran.

### **Pendampingan**

Pendampingan adalah suatu tugas atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi penghubung masyarakat dengan berbagai lembaga terkait. Berdasarkan hasil penelitian dibawah upaya pemerintah untuk melakukan kegiatan pendampingan adalah dengan cara terjun langsung untuk mendampingi masyarakat kelompok tani yang ada di kelurahan Cereme Taba.

Berdasarkan hasil peneliti di bawah sesuai dengan teori yang Menurut Suharto (2006), hal. 93, pendampingan merupakan strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, bantuan ini mutlak diperlukan untuk pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Cereme Taba. Namun kelompok tani di kecamatan tersebut hanya dibina di Desa Toapaya oleh Petugas Penyuluh Lahan Petani (PPL) dari Departemen Pertanian.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat diklarifikasikan bahwa Pendampingan yang di lakukan dengan Dinas Pertanian kepada kelompok tani, didukung data berupa dokumentasi photo di Kelurahan Cereme Taba.

### **Peran Fasilitator**

Fasilitator dalam Pemberdayaan petani dinilai cukup memuaskan. Meskipun pemerintah, yang bertindak sebagai fasilitator, telah memberikan bantuan kepada petani, pelatihan teknis dan keterampilan masih diperlukan untuk menjadikannya lebih baik lagi. Dalam Labolo (2010), Ryaas Rasyid menyatakan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menumbuhkan berkembangnya berbagai kepentingan masyarakat guna memaksimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, otoritas publik bekerja di bidang bantuan melalui penyiapan, pelatihan dan pengembangan lebih lanjut kemampuan, serta di bidang subsidi atau permodalan melalui pemberian bantuan permodalan kepada jaringan yang terlibat. Tanpa mengambil sikap dalam diskusi, seorang fasilitator membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama dan merancang strategi untuk mencapainya.

Fasilitator adalah seseorang yang berperan membantu kelompok atau individu dalam proses diskusi, pertemuan, atau pelatihan agar mencapai tujuan bersama dengan efektif. Tugas utama fasilitator adalah memandu jalannya kegiatan, menjaga fokus,

mengelola dinamika kelompok, serta memastikan semua peserta memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara aktif. Fasilitator tidak mendominasi pembicaraan atau mengambil keputusan, melainkan membantu kelompok untuk menemukan solusi dan membuat keputusan secara kolektif.

### **Penyediaan Bibit Unggul**

Berdasarkan hasil penelitian dibawah upaya pemerintah yaitu menciptakan keadaan-keadaan yang berguna bagi pelaksanaan perbaikan atau mengambil bagian dalam menghubungkan kepentingan-kepentingan pemerintah dengan daerah serta sebaliknya dalam meningkatkan pelaksanaan perbaikan wilayah. Sebagai fasilitator, otoritas publik harus menjadi spesialis yang mampu membuat dan memberikan kantor yang sesuai dengan kebutuhan daerah setempat.

Berdasarkan hasil penelitian Menurut teori Labolo (2010:36) mengemukakan bahwa Tugas pemerintah yang berkaitan dengan perbaikan dan penguatan daerah mempunyai kemampuan opsional atau penguatan kemampuan, khususnya kewenangan publik apabila timbul kebutuhan dan tuntutan daerah mengenai tenaga kerja dan produk yang tidak dapat dipenuhi karena tidak adanya sumber daya lokal. penguatan bidang mengenai pedoman dan kerangka kerja.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara pemerintah telah memberikan bantuan berupa bibit sayuran dan telah di terima oleh kelurahan dan kelompok tani dan dokumentasi dapat diklarifikasikan bahwa yang di lakukan dengan Dinas Pertanian kepada kelompok tani, didukung data be pembibitan.

### **Penyediaan Alat**

Penyediaan alat adalah proses pengadaan dan penyaluran peralatan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan tertentu. Ini melibatkan langkah-langkah seperti perencanaan kebutuhan, pemilihan alat yang sesuai, pembelian, penyimpanan, distribusi, serta pemeliharaan dan perawatan alat tersebut. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua peralatan yang diperlukan tersedia dalam kondisi baik dan siap digunakan sesuai kebutuhan.

Berdasarkan hasil penelitian dibawah upaya pemerintah kepada masyarakat kelompok tani dalam melaksanakan program pkh yang dilakukan Dikelurahan cereme Taba.Pemerintah dinas pertanian memberikan bantuan berupa alat yang akan digunakan untuk masyarakat kelompok tani dengan menyediakan alat berupa cangkul,alat semprot,pipa,paku, kayu dan alat lainnya Berdasarkan hasil penelitian diatas sesuai dengan teori Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan peneliti mengenai Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaam Kelompok Tani Dikelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau dapat disimpulkan bahwa, Peran pemerintah pada aspek regulator khususnya mengenai Dinas Terkait dalam pemberdayaan memang sudah ada kerjasama dari dinas pertanian dengan kelurahan Cereme Taba.

Teori Penggantian Teknologi (Technology Replacement Theory): Menyediakan alat berdasarkan siklus penggantian teknologi di mana alat yang lebih tua digantikan



dengan yang lebih baru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Keputusan tentang kapan mengganti alat sering kali didasarkan pada analisis biaya-manfaat.

Peran pemerintah dalam aspek dinamis yang mencakup sub-indikator sosialisasi dan pendampingan menunjukkan bahwa kedua sub-indikator tersebut masih menunjukkan arah yang salah, terbukti dari pengamatan bahwa sosialisasi jarang dilakukan. Di Desa Cereme Taba sosialisasi yang dilakukan dinilai kurang memenuhi kebutuhan masyarakat petani yang sudah ada.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara pemerintah PPL telah memberikan bantuan berupa alat dan telah di terima oleh kelurahan dan kelompok tani dapat diklarifikasikan bahwa yang di lakukan dengan Dinas Pertanian kepada kelompok tani, didukung photo alat.

## **KESIMPULAN**

Menilik dari hasil perbincangan tersebut, maka ditutuplah ilmuwan Sehubungan dengan Tugas Badan Publik dalam Mengaktifkan Pertemuan Para Peternak di Kecamatan Cereme Taba Kawasan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, maka dapat diduga bahwa, Tugas dari otoritas publik dalam perspektif administratif, khususnya yang berkaitan dengan Administrasi Terhubung dalam pemberdayaan memang sudah ada kerjasama dari dinas pertanian dengan kelurahan Cereme Taba.

Dengan menyusun dan menetapkan peraturan bagi masyarakat, pemerintah menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan efektivitas demi tertibnya pembangunan dan pembangunan. Inilah peran pemerintah sebagai regulator.

Sub-indikator Kunjungan Lapangan dan Pendampingan yang mencerminkan peran pemerintah dalam aspek Dinamika. menunjukkan bahwa kedua sub-indikator tersebut masih menunjukkan arah yang salah, mengingat sangat jarang dilakukan kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan yang dilakukan dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan budidaya daerah setempat. yang berada di Kota Cereme Taba.

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator Pemerintah telah mampu membantu masyarakat petani di Kecamatan Cereme Taba dalam mencapai pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan bibit sayuran, pupuk, dan peralatan pertanian lainnya. Kelompok tani telah menerima hal ini, menurut wawancara.

Meskipun prosedur pembagiannya tidak merata Secara keseluruhan, masing-masing peran memiliki indikator yang spesifik yang menunjukkan seberapa baik menjalankan tugas mereka dalam konteks regulasi, dinamisasi, atau fasilitasi Indikator- indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas dan keberhasilan dalam setiap peran, serta memastikan bahwa tujuan organisasi atau proyek tercapai dengan cara yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afni, Nur. 2014. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan masyarakat Petani di Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng. Unismuh Makassar.
- Alfitri. 2011. Community Development (Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alam, Syamsul. 2012. Perencanaan Pemerintah Daerah dalam Melestarikan Kebudayaan Tanah Adat Karangpuang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. Unismuh Makassar.
- Bahtiar, A. M. 2011. Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Pengembangan Partisipatif (Pembangunan Irigasi) di Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara. Unismuh Makassar.
- Dyah R espati, dan Hastuti. 2009. Model Pemberdayaan. Negeri : Yogyakarta
- Davey, K.J, 2008, Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek International dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga, Penerjemah Amanullah dkk, UI Press, Jakarta. Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sektor Budidaya Perairan.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka.
- Fairus, M. (2022). Strategi Pemerintah Desa Keban Kabupaten Karimun Hukum, 16(1), 119. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130> Jurnal Ilmiah Administratie, 10 Nomor 1, 69. Jurnal Govenance, 1(2), 1-9
- Liwu, A. S., & Sasmito, C. (2019). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani. JISIP -Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 8(4), 228-233.
- Labolo, Muhadam. 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, J.L. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tadanugi, I. N. (2018) Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Kabupaten Morowali Utara.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Pebriyani, D., & Hermawan, E. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangungan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Inovasi Penelitian, 1(3), 197-206
- Pamudji, S. S. 2012. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara
- Rosidin, U. (2019). Pemberdayaan Desa: Dalam Sistem Pemerintahan Daerah (cetakan 1). cv pustaka Setia.

- Usman, S. (2012). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (cetakan VI). Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D (Cetakan ke). Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif .Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2014. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Suhendra., 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Alfabeta.
- Suriadi, Agus., 2005. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Medan: Departemen Ilmu Kesejahteraan Ilmu Sosial Fisip USU.
- Widarni, R. T. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kewenangan Desa, Pub. L. No. 44, 44 1 (2014). Yogyakarta.
- Siagian, S.P. 2009. Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi, dan Strateginya, Jakarta: Bumi Aksara